

INFLASI DALAM PERSPEKTIF TEORI MONETER: ULASAN KRITIS TERHADAP KONSEP NILAI UANG

Muhammad Ishak¹, Annurusyifa Arimbi², Hayyul Falah³, Sanusi Ghazali Pane*⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: em.isak098@gmail.com¹, annurusyifaarimbi@gmail.com²,
hayyulfalahsinaga@gmail.com³, sanusi.gazali.pane@gmail.com⁴,

***Abstract:** This study explores inflation from the perspective of monetary theory, emphasizing the concept of money's value as a foundation for understanding inflationary phenomena. Inflation is not merely viewed as a general increase in prices, but also as a reflection of the imbalance between the money supply and the real value of goods and services in the economy. This review critically examines both classical and modern monetary theories to evaluate how effectively they explain inflation dynamics in the context of today's economic environment. The role of monetary authorities in regulating money supply and maintaining the stability of money's value is a focal point of analysis. Furthermore, the study highlights how public perception of money's value influences inflation expectations and broader economic policies. The findings suggest that a comprehensive understanding of inflation must incorporate both intrinsic and exchange value dimensions of money, which are central elements in monetary theory. Through a literature-based conceptual approach, this research provides a theoretical foundation for more effective and sustainable monetary policy analysis.*

***Keywords:** Inflation, Monetary Theory, Value Of Money, Expectations, Monetary Policy.*

Abstrak: Penelitian ini membahas inflasi dari perspektif teori moneter dengan menyoroti konsep nilai uang sebagai dasar pemahaman terhadap fenomena inflasi. Inflasi tidak hanya dipahami sebagai kenaikan harga secara umum, tetapi juga sebagai refleksi ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan nilai riil barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam kajian ini, teori moneter klasik dan modern dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana pandangan tersebut mampu menjelaskan dinamika inflasi dalam konteks ekonomi kontemporer. Penekanan diberikan pada peran otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai uang. Selain itu, dibahas pula bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai uang dapat memengaruhi ekspektasi inflasi dan kebijakan ekonomi secara lebih luas. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap inflasi tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap nilai intrinsik dan nilai tukar uang, yang keduanya merupakan elemen penting dalam teori moneter. Dengan pendekatan konseptual berbasis literatur, penelitian ini bertujuan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi analisis kebijakan moneter yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Inflasi, Teori Moneter, Nilai Uang, Ekspektasi, Kebijakan Moneter.

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena ekonomi makro yang telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi, baik pada level nasional maupun global. Secara umum, inflasi dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun, pemaknaan terhadap inflasi tidaklah tunggal; terdapat berbagai pendekatan teoretis dalam menjelaskan penyebab, dampak, serta mekanisme pengendaliannya. Salah satu pendekatan yang paling dominan adalah pendekatan moneter yang menekankan pentingnya jumlah uang beredar sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat inflasi. Pendekatan ini telah berkembang dari teori kuantitas uang klasik hingga teori moneter modern yang lebih kompleks dan dinamis (Astuti, Putri, & Samsudin, 2025).

Dalam pendekatan moneter klasik, Irving Fisher menjadi tokoh penting dengan rumus $MV = PT$, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah volume transaksi. Menurut Fisher, peningkatan jumlah uang (M) tanpa diiringi peningkatan volume transaksi (T) akan menyebabkan peningkatan harga (P), yang berarti inflasi (Agustino, 2025). Walaupun rumus ini terlihat sederhana, namun memberikan dasar yang kuat bagi para ekonom moneter dalam menilai pentingnya kontrol terhadap suplai uang sebagai instrumen pengendalian inflasi. Pemikiran Fisher ini juga menjadi fondasi bagi teori kuantitas uang yang digunakan oleh para ekonom moneter hingga saat ini.

Dalam konteks kontemporer, peran bank sentral menjadi sangat signifikan dalam

mengimplementasikan kebijakan moneter sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Bank sentral memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas nilai uang dan kestabilan harga melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta pengendalian cadangan wajib minimum (Astuti, Putri, & Samsudin, 2025). Implementasi kebijakan tersebut berorientasi pada pengelolaan permintaan uang dan pengendalian tekanan harga dari sisi permintaan agregat. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan moneter tidak selalu berhasil secara optimal mengendalikan inflasi karena adanya variabel lain seperti ekspektasi inflasi, kondisi pasar global, serta struktur ekonomi domestik yang kompleks (Maharani & Riofita, 2024).

Di Indonesia, inflasi bukan hanya menjadi isu ekonomi teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap inflasi harus dikaitkan pula dengan nilai uang dalam perspektif yang lebih mendalam. Nilai uang tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga mencerminkan daya beli, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter (Wati & Aziz, 2024). Dalam hal ini, teori moneter berperan sebagai kerangka konseptual yang memberikan pemahaman mendalam terhadap hubungan antara jumlah uang beredar dan perubahan tingkat harga.

Menariknya, dalam ekonomi Islam, pendekatan terhadap inflasi dan nilai uang menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Pemikiran-pemikiran

klasik seperti yang dikemukakan oleh Al-Maqrizi dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa inflasi dapat terjadi akibat praktik yang tidak adil dalam pencetakan uang, serta akibat buruknya tata kelola ekonomi oleh otoritas (Putra, Tarigan, & Ridwan, 2025; Anwar et al., 2025). Al-Maqrizi misalnya, mengaitkan inflasi dengan penurunan nilai intrinsik mata uang akibat pencampuran logam mulia dengan logam murah, yang secara fundamental merusak kepercayaan terhadap mata uang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya bersumber dari aspek kuantitatif uang beredar, tetapi juga dari aspek moral, etika, dan keadilan dalam sistem moneter.

Tinjauan terhadap berbagai mazhab dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya dilihat dari efektivitas ekonominya, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Tiga mazhab ekonomi Islam — yaitu mazhab ortodoks, mazhab moderat, dan mazhab progresif — memiliki pandangan berbeda dalam menilai peran kebijakan moneter terhadap permintaan uang dan stabilitas harga (Putri, Andini, & Hayati, 2025). Dalam kerangka ini, nilai uang tidak hanya merefleksikan fungsi alat tukar, tetapi juga simbol integritas sistem ekonomi yang dijalankan secara syariah. Maka dari itu, dalam menghadapi inflasi, kebijakan moneter perlu dirancang tidak hanya berdasarkan logika pasar dan rasionalitas ekonomis, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat.

Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi masih menghadapi berbagai

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya integrasi antara pendekatan moneter konvensional dengan pendekatan nilai-nilai lokal dan syariah yang berkembang di masyarakat (Dwihapsari, Kurniaputri, & Huda, 2021). Dalam hal ini, strategi pengendalian inflasi berbasis pendekatan syariah seperti yang dikembangkan oleh Umer Chapra menekankan pada pentingnya stabilitas sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan (Wati & Aziz, 2024). Chapra berargumen bahwa sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak adil merupakan akar dari banyak masalah makroekonomi, termasuk inflasi.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga mengubah dinamika nilai uang dan inflasi di era modern. Sistem keuangan digital, mata uang kripto, dan sistem pembayaran elektronik membawa tantangan baru dalam menjaga stabilitas moneter. Dalam kondisi ini, pendekatan moneter konvensional yang hanya mengandalkan pengendalian basis moneter tidak lagi memadai. Diperlukan pendekatan holistik yang memperhatikan perubahan struktur ekonomi dan dinamika nilai uang dalam dunia digital (Kunaifi & Rosyid, 2023). Oleh karena itu, studi terhadap konsep nilai uang menjadi semakin relevan, tidak hanya dalam arti nominal tetapi juga dalam arti fungsional dan kepercayaan publik.

Dari berbagai ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak hanya merupakan persoalan kenaikan harga, tetapi merupakan gejala dari persoalan yang lebih kompleks terkait dengan sistem moneter, nilai uang, serta integritas ekonomi. Pendekatan moneter memberikan kerangka

analisis yang kuat, namun tetap perlu dikritisi dan dilengkapi dengan pendekatan moral, historis, dan filosofis agar mampu menangkap kompleksitas permasalahan secara utuh (Agustino, 2025). Nilai uang sebagai konsep ekonomi seharusnya tidak direduksi hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol stabilitas sosial dan keadilan ekonomi.

Kajian kritis ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam teori moneter dalam menjelaskan inflasi, dengan fokus pada konsep nilai uang sebagai kunci pemahaman terhadap dinamika ekonomi makro. Penelitian ini akan menelusuri pemikiran-pemikiran moneter klasik dan modern, termasuk pandangan Islam, serta menilai relevansinya dalam konteks ekonomi Indonesia yang terus berubah. Dengan mengkaji literatur secara komprehensif, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam merumuskan kebijakan moneter yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan (Istiqomah, Izzany, & Nurhasanah, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat teoritis dan konseptual, yaitu bertujuan untuk mengulas dan mengkaji berbagai teori serta pandangan ilmiah mengenai inflasi dari perspektif teori moneter, dengan fokus khusus pada konsep nilai uang. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel ilmiah dari jurnal nasional yang terakreditasi, buku-buku ekonomi klasik dan kontemporer, serta tulisan para pemikir ekonomi Islam.

Seluruh data yang dikumpulkan bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis. Langkah pertama dalam analisis adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai teori moneter yang membahas inflasi, termasuk dari pemikiran ekonomi konvensional maupun Islam. Selanjutnya, dilakukan proses interpretasi dan perbandingan untuk melihat konsistensi, relevansi, serta kekuatan argumentatif dari masing-masing teori terhadap kondisi empiris ekonomi Indonesia maupun global. Peneliti juga mengeksplorasi kontribusi para tokoh ekonomi seperti Irving Fisher, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan Umer Chapra sebagai basis konseptual untuk menelaah nilai uang dalam konteks inflasi.

Dengan mengandalkan pendekatan studi pustaka, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan atau analisis statistik kuantitatif, melainkan bertumpu pada penggalian literatur dan penalaran logis untuk menarik kesimpulan. Validitas data dijaga melalui seleksi ketat terhadap sumber pustaka yang kredibel dan relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumen teoritis yang kuat dan terstruktur dalam memahami dinamika inflasi dari perspektif teori moneter secara mendalam dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi merupakan fenomena makroekonomi yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Dalam kajian ekonomi moneter, inflasi diposisikan sebagai

konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar dan output barang dan jasa dalam perekonomian. Teori kuantitas uang, yang berasal dari pemikiran Irving Fisher, mengemukakan bahwa ketika uang yang beredar (M) meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan output (T), maka akan terjadi kenaikan harga (P) secara menyeluruh (Agustino, 2025). Dengan kata lain, stabilitas harga sangat ditentukan oleh kemampuan otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar.

Dalam praktiknya, bank sentral memegang peran strategis sebagai pengendali utama stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Bank Indonesia, misalnya, menjalankan kebijakan moneter secara independen untuk menstabilkan inflasi agar tetap berada dalam target sasaran inflasi tahunan. Namun, efektivitas kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan dari ketidakpastian global, tekanan dari sisi penawaran, serta fluktuasi nilai tukar (Astuti, Putri, & Samsudin, 2025). Ketika tekanan eksternal memperlemah nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat pun menurun, memperburuk inflasi yang sudah terjadi akibat tekanan domestik dari sisi permintaan.

Lebih lanjut, inflasi tidak hanya berakar dari faktor moneter, tetapi juga dari ekspektasi masyarakat terhadap nilai uang di masa depan. Ketika publik kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas mata uang, mereka cenderung mempercepat konsumsi atau beralih ke bentuk aset yang dianggap lebih stabil. Hal ini dapat mempercepat laju inflasi melalui efek psikologis. Ekspektasi ini

berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap nilai intrinsik uang, yaitu seberapa besar nilai riil yang mereka rasakan dari satu unit mata uang. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap konsep nilai uang menjadi sangat penting, karena nilai uang tidak lagi bersandar pada logam mulia, melainkan sepenuhnya pada kepercayaan publik dan stabilitas institusional (Maharani & Riofita, 2024).

Konsep nilai uang dalam Islam memandang uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penopang keadilan ekonomi. Ibnu Khaldun, misalnya, menekankan bahwa uang yang baik adalah uang yang memiliki nilai intrinsik, seperti dinar dan dirham, yang berbasis logam mulia. Baginya, inflasi dapat terjadi karena penurunan kualitas uang akibat praktik-praktik curang seperti pengurangan kadar logam mulia dalam mata uang (Anwar et al., 2025). Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi modern, di mana penciptaan uang tanpa basis nilai riil (fiat money) menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar dan inflasi struktural.

Al-Maqrizi juga memberikan kritik tajam terhadap praktik penguasa yang mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai pengeluaran negara tanpa dukungan produktivitas. Ia menyebut inflasi sebagai akibat dari ketidakadilan sistemik, di mana rakyat harus menanggung beban akibat merosotnya nilai uang yang dipaksakan oleh negara (Putra, Tarigan, & Ridwan, 2025). Dalam konteks Indonesia, pandangan ini bisa diterapkan dalam menelaah bagaimana ekspansi fiskal dan moneter tanpa perhitungan matang dapat memicu tekanan harga yang tidak terkendali, terutama dalam

kondisi ekonomi yang sedang mengalami stagnasi.

Dalam kerangka teori moneter Islam kontemporer, pemikiran Umer Chapra menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap inflasi dan nilai uang. Chapra menolak sistem moneter berbasis bunga dan lebih menekankan pada sistem keuangan berbasis bagi hasil yang adil. Ia menilai bahwa akar inflasi terletak pada sistem keuangan yang tidak etis, yang mendorong spekulasi dan penciptaan uang berlebihan melalui sistem perbankan berbasis utang (Wati & Aziz, 2024). Untuk itu, pengendalian inflasi dalam pandangan Chapra harus dilakukan melalui pembaruan struktural sistem keuangan, termasuk dalam kebijakan fiskal yang adil dan sistem perbankan yang inklusif.

Pendekatan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga dapat dilihat melalui tiga mazhab pemikiran: ortodoks, moderat, dan progresif. Mazhab ortodoks cenderung menolak intervensi pemerintah dalam jumlah uang beredar, sementara mazhab moderat menerima peran negara dalam mengatur sistem moneter asalkan tetap dalam batas syariah. Adapun mazhab progresif mendukung peran aktif negara dalam menstabilkan perekonomian, termasuk penggunaan kebijakan moneter untuk tujuan distribusi keadilan dan stabilitas harga (Putri, Andini, & Hayati, 2025). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa inflasi tidak bisa hanya dijelaskan secara teknis, tetapi juga dari nilai-nilai dan tujuan ekonomi yang diemban oleh sistem moneter.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwihapsari, Kurniaputri, dan Huda (2021) menunjukkan bahwa di Indonesia, kebijakan

moneter konvensional seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka terbukti cukup efektif dalam menekan inflasi jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, efektivitas kebijakan ini menurun karena lemahnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Selain itu, dalam pendekatan syariah, stabilitas nilai uang tidak hanya diukur dari tingkat inflasi semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi.

Sementara itu, studi oleh Istiqomah, Izzany, dan Nurhasanah (2025) menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam sistem ekonomi Islam. Mereka menyatakan bahwa kebijakan moneter yang adil akan mencegah terjadinya penimbunan harta, eksploitasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, stabilitas harga tidak cukup hanya dilihat dari indikator inflasi yang rendah, tetapi harus dikaitkan dengan keadilan ekonomi secara menyeluruh. Dalam hal ini, konsep nilai uang dalam Islam berfungsi sebagai instrumen moral untuk menjaga keharmonisan sosial melalui sistem moneter yang stabil dan adil.

Pasca pandemi, kebijakan pelonggaran kuantitatif (*Quantitative Easing*) yang dilakukan oleh banyak bank sentral di dunia termasuk Indonesia, menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas nilai uang. Ketika suplai uang meningkat secara masif untuk mendorong pemulihan ekonomi, tekanan inflasi pun meningkat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan seperti QE ini dipandang berisiko jika tidak disertai dengan pengendalian distribusi uang secara adil dan penggunaan dana yang produktif (Kunaifi & Rosyid, 2023). Hal ini

mempertegas bahwa penciptaan uang harus selalu dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil agar tidak merusak nilai intrinsik uang dan menimbulkan distorsi harga.

Salah satu permasalahan utama dalam pengendalian inflasi adalah ketergantungan terhadap kebijakan jangka pendek yang reaktif, bukan kebijakan struktural yang berorientasi jangka panjang. Ketika bank sentral hanya fokus pada target inflasi tahunan tanpa memperhatikan faktor struktural seperti produktivitas, ketimpangan, dan kepercayaan publik terhadap sistem moneter, maka stabilitas jangka panjang sulit dicapai (Astuti, Putri, & Samsudin, 2025). Oleh karena itu, peran institusi dalam menjaga nilai uang menjadi penting, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi etika dan tata kelola ekonomi.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan refleksi dari degradasi nilai uang, baik secara nominal maupun moral. Dalam sistem konvensional, nilai uang cenderung diperlakukan sebagai variabel ekonomi yang netral, padahal dalam praktiknya, nilai uang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan sosial, struktur kekuasaan, dan kepercayaan publik. Dalam sistem Islam, nilai uang diposisikan secara normatif sebagai amanah yang harus dijaga keadilannya, baik oleh individu maupun negara (Putra, Tarigan, & Ridwan, 2025). Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan moral dan maqashid syariah yang lebih luas

KESIMPULAN DAN SARAN

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui satu teori saja. Meskipun

teori moneter klasik telah memberikan kerangka dasar yang kuat dalam menjelaskan inflasi sebagai akibat dari penambahan jumlah uang yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan output, kenyataannya, inflasi mencerminkan dinamika yang lebih luas dari sekadar ketidakseimbangan moneter. Hal ini melibatkan faktor psikologis, struktural, institusional, dan kebijakan, yang semuanya berkontribusi dalam pembentukan harga-harga di pasar.

Konsep nilai uang menjadi kunci utama dalam memahami inflasi secara menyeluruh. Nilai uang bukan hanya sekadar ukuran nominal, tetapi juga merefleksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan moneter yang berlaku. Dalam masyarakat modern yang menggunakan uang fiat, kepercayaan terhadap bank sentral dan sistem perbankan sangat menentukan stabilitas nilai uang. Ketika kepercayaan ini melemah, maka ekspektasi inflasi cenderung meningkat, sehingga mempercepat proses inflasi secara riil.

Dalam konteks kebijakan, bank sentral memiliki peran sentral dalam mengendalikan inflasi melalui instrumen-instrumen moneter seperti suku bunga, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kondisi makroekonomi, stabilitas politik, dan daya dukung sektor riil. Kebijakan moneter yang bersifat reaktif dan jangka pendek sering kali gagal memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap inflasi, terutama jika tidak disertai dengan kebijakan struktural dan fiskal yang sinergis.

Perspektif Islam memberikan warna yang berbeda dalam memahami inflasi dan nilai uang. Dalam pandangan ekonomi Islam,

uang bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga amanah moral yang harus dijaga nilainya. Inflasi, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar permasalahan teknis, tetapi juga permasalahan moral dan etis akibat penyalahgunaan wewenang, distribusi yang tidak adil, dan lemahnya tata kelola sistem moneter. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga normatif dan berorientasi pada keadilan.

Sejarah pemikiran Islam, seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi, menunjukkan bahwa inflasi sudah lama menjadi perhatian para ilmuwan Muslim. Mereka mengaitkan inflasi dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengabaian terhadap nilai intrinsik uang. Pemikiran ini sangat relevan di era modern, terutama ketika kebijakan moneter cenderung berfokus pada mekanisme pasar dan melupakan aspek keadilan sosial dan stabilitas jangka panjang. Oleh sebab itu, pendekatan holistik dan etis perlu dikembangkan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan moneter.

Integrasi antara pendekatan konvensional dan syariah dalam merumuskan kebijakan moneter merupakan langkah yang strategis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan stabil. Nilai uang dalam ekonomi Islam bukan sekadar angka yang stabil secara statistik, tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi keuangan dalam upaya menstabilkan nilai uang dan menekan laju inflasi.

Akhirnya, kajian kritis terhadap inflasi dari perspektif teori moneter dan konsep nilai uang membawa kesadaran bahwa stabilitas harga bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi juga persoalan filosofis, ideologis, dan etis. Diperlukan pendekatan multidisipliner dan nilai-nilai yang mendalam dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat pemahaman terhadap konsep nilai uang dan memperluas cakupan kebijakan moneter yang berkeadilan, diharapkan stabilitas ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, A. O., Andini, V. G., & Hayati, S. (2025). Kebijakan Moneter dalam Tinjauan Tiga Mazhab Ekonomi Islam Terhadap Permintaan Uang. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 73-83.
- Putra, M. U. M., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2025). Konsep Syariah Dan Sejarah Intelektual Pemikiran Inflasi: Telaah Kritis Atas Gagasan Al Maqrizi dan relevansinya Terhadap Kondisi Inflasi di Sumatera Utara. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, 5(1), 85-93.
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 980-993.
- Wati, N. A. R., & Aziz, J. A. (2024). Strategi Pengendalian Inflasi untuk Stabilitas Harga melalui Kebijakan Moneter Perspektif Umer Chapra. *Iqtishodiyah*:

- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), 284-298.
- Astuti, R. P., Putri, S. A., & Samsudin, A. (2025). Kebijakan Moneter: Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*| E-ISSN: 3063-8208, 1(4), 583-587.
- Maharani, N., & Riofita, H. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN MONETER TERHADAP INFLASI DI INDONESIA. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6).
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 18-33.
- Anwar, Y. S., Saputra, F., Rais, M., & Putra, I. J. (2025). Konsep dan Teori Uang Menurut Ibnu Khaldun. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 19-30.
- AGUSTINO, R. (2025). Filsafat Ekonomi Irving Fisher. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 16(1), 1-13.
- Kunaifi, A., & Rosyid, A. (2023). Pascapandemi, Bagaimana Efektifitas Kebijakan Quantitative Easing (QE)?: Konsep Sistem Moneter Islam dalam Menstabilkan Ekonomi. *Istithmar*, 7(2), 131-141.